

# RENJA (RENCANA KERJA)

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT

TAHUN  
**2023**



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**BUPATI BONE,**



*[Handwritten signature]*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



*[Handwritten signature]*  
**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39**

LAMPIRAN LXV  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN TANETE  
RIATTANG BARAT  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan pada tahun 2022 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi Kabupaten Bone. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Watang Palakka, 25 Juli 2022

CAMAT TANETE RIATTANG BARAT,



**HASNAWATI RAMLI, S.Sos. M.Si**

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19690717 198908 2

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Tabel 1.1	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	5
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
	1.4. Sistematika Penulisan....	11
BAB II	HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	12
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	12
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
	2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	21
	2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD .....	25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat .....	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	34
	3.3. Program dan Kegiatan .....	35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V	PENUTUP .....	38
LAMPIRAN	CASCADING .....	40
	PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Kecamatan S/D Tahun 2022 Berdasarkan PMDN-90	13
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat.....	20
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Tanete Riattang Barat.....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....	2
Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	4



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

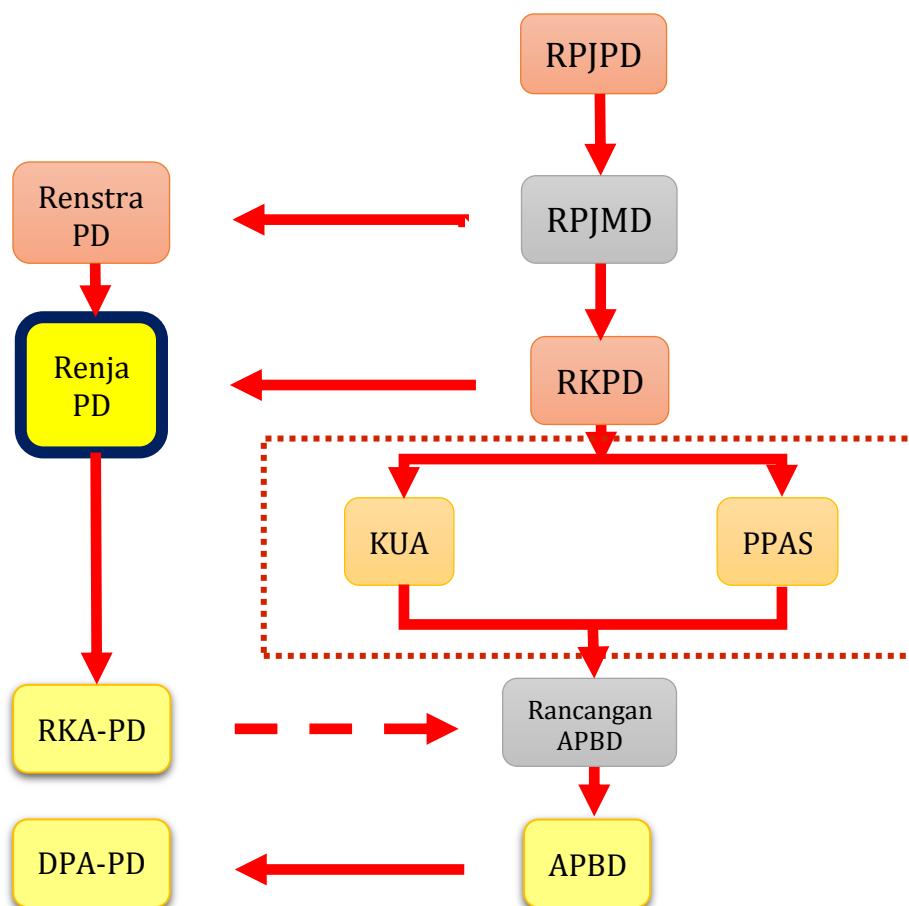
Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya





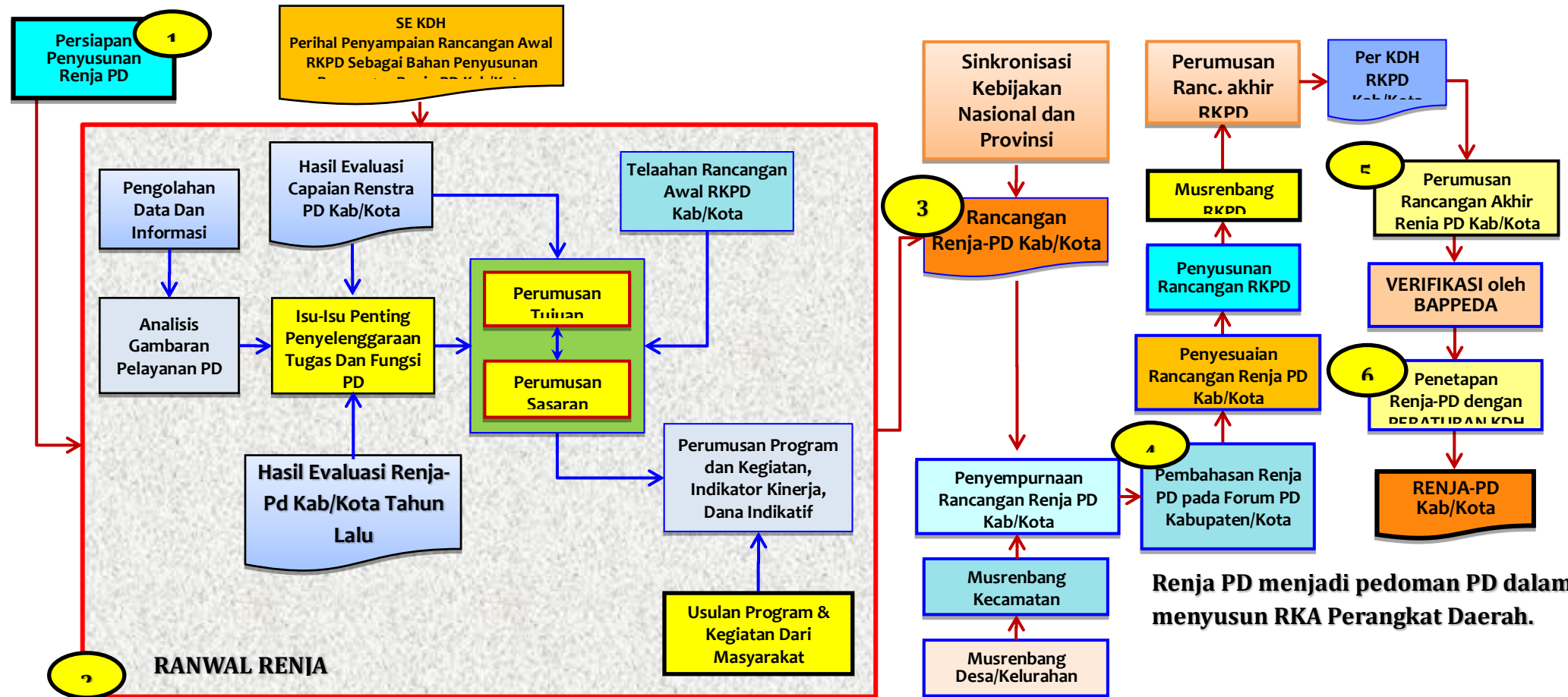
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Renja PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

(Pasal 125-143 Permendagri 86/2017)

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94),
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34)

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Kecamatan Tanete Riattang Barat
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone



#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

**BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu** ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**BAB V PENUTUP** ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat yang dibagi kedalam dua versi yakni Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tanete Riattang Barat tahun berjalan (tahun 2022). Adapun gambaran selengkapnya, disajikan dalam table berikut ini :

**Tabel 2.1 (T-C.29.)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022 BERDASARKAN PMDN-90**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7										
	URUSAN KEWILAYAN									
7	01									
	KECAMATAN									
7	01	01			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	01	8	2	3	100%	2	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)								
7	01	01	2.01	02	7	1	1	100%	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)								
7	01	01	2.01	03	6	1	1	100%	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)								

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	6	0	1	1	100%	1	2	100%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	12	12	12	12	100%	12	6	50%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	0	0	0	0	12	6	50%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel)	40	18	18	18	100%	18	24	100%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	12	3	3	3	100%	3	9	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan)	12	3	3	3	100%	3	3	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	12	3	3	3	100%	3	3	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12	12	12	12	100%	12	6	50%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan)	750	120	264	264	100%	264	140	77%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)	9	3	3	3	100%	2	8	100%

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	22	3	5	5	100%	4	12	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36	36	36	36	100%	36	108	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	588	156	144	144	100%	156	70	78%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit)	18	5	5	5	100%	4	14	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12	12	12	12	100%	12	6	50%
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	8	2	2	2	100%	2	2	100%
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika(kali)	108	36	36	36	100%	36	18	50%
Sumber data : Renstra Perubahan 2018-2023, Renja Perubahan 2021 dan Rena 2022, LK-IP Tahun 2021														

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel 1.2 di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2, maka hasil evaluasi internal terhadap 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 23 indikator sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari 23 indikator kinerja sub kegiatan (*output*), *nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan* hingga triwulan ke 2 tahun 2022 sebesar 87,17%, dengan rincian sebagai berikut :
  - 18 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
  - 2 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65-90%;
  - 2 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
  - 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.
- b. Dari 12 indikator kinerja kegiatan (*initial outcome*), *nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan* hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :
  - 12 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- c. Dari 4 indikator kinerja program (*outcome*), *nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program* hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :
  - 4 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2022 adalah komitmen dan sinergitas seluruh pegawai Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, disamping ketersediaan anggaran yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbaikan manajemen kinerja dan keuangan yang telah dibangun turut memberikan andil yang signifikan dalam pencapaian kinerja ini, disiplin pegawai dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai dan terus ditingkatkan dengan komitmen seluruh jajaran di Kecamatan Tanete Riattang Barat sangat berkontribusi dalam peningkatan pencapaian kinerja.



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan unsur perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat.

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Tanete Riattang Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan Renstra, merupakan gambaran pencapaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone sesuai Renstra Pokok dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 (T-C.30)**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB	A	A	B	A	A	A
<b>Catatan Analisis</b> Capaian terhadap indikator ini disebabkan oleh <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan terhadap kualitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat melalui perumusan perencanaan strategis yang semakin responsive sesuai dengan kebutuhan masyarakat tepat akuntabel dan berorientasi hasil pada dokumen perubahan strategis kecamatan Tanete Riattang Barat</li> <li>Pengawasan dan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat dilaksanakan secara berkala per triwulan dan semester dengan melibatkan pihak internal dan eksternal atau perangkat daerah lain yaitu inspektorat daerah, badan Perencanaan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone</li> <li>Peningkatan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel dan transparan dengan kontroling dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran</li> </ol>											
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			90	92	100	100	90	100	100	100
<b>Catatan Analisis</b> Capaian terhadap indikator ini disebabkan oleh <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan yang semakin cepat dan berkualitas</li> <li>Bertambahnya sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat</li> <li>Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan</li> </ol>											

*Sumber Data : Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023*

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Tanete Riattang Barat.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

7. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
8. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
9. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
10. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
11. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-
12. 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima

dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

Kecamatan Tanete Riattang Barat menjadi salah satu Perangkat Daerah yang berperan utama dalam mendorong pencapaian Misi dan Tujuan RPJMD yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN”**, dengan tujuan **“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN”**.

Arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Tanete Riattang Barat untuk mencapai tujuan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bone sebagaimana diatas ditetapkan satu arah kebijakan yaitu mengembangkan sistem operational prosedur pelayanan dan tata laksana penunjang pemerintahan umum. Dengan strategi yang menjadi tantangan sebagai berikut

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan publik di kecamatan
3. Peningkatan dan perbaikan sistem pelaporan kinerja
4. Perbaikan dan pemutakhiran data yang valid dalam sistem pelayanan public
5. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat memiliki ruang lingkup tugas yakni Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat terdapat adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain

- a. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- b. Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
- c. Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat computer.
- d. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- e. Mekanisme dan polakerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- f. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Tanete Riattang Barat terutama pada jajaran Kasubag yang masih banyak kosong.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran penjabaran dari RPJMD.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Semuanya itu dituangkan ke dalam table T-C.31 berikut ini :

**Tabel 2.4 (T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT**

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,394,210,518	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	18,783,565,672	Penyesuaian nomenklatur dan sub indikator kegiatan sesuai kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	100 Persen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	100 Persen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2 dokumen	43,656,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 dokumen	8,400,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2 dokumen	3,388,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	2,958,410	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	4 dokumen	3,461,810	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	2,589,800	



4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	3 dokumen	27,344,076	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3 Laporan	22,598,410	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	4 dokumen	5,932,988	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan	19,424,707,169	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	182 orang/bulan	17,648,486,282	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	9,240,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	8,400,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen		
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9,240,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8,400,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	9,240,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	8,400,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	12 Laporan	91,127,729	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	108 Paket	56,533,840	

11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan)	12 Laporan	460,925,300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riatang Barat	'Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	108 Paket	189,344,070	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	12 Laporan	42,350,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	108 Paket	18,290,000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12 Laporan	28,314,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	96 Dokumen	15,360,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan)	908 kegiatan	28,314,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	908 Laporan	148,100,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	10 unit	60,036,701	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riatang Barat	'Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	6 unit	51,645,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen		
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36 rekening'	76,147,995	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	69,676,800	

17	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	12 Laporan	519,394,480	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riatang Barat	'Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	465,218,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit)	18 unit	127,766,320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riatang Barat	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4 unit	41,125,000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12 Unit	62,420,331	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	13,539,460	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100 Persen	55,659,879	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100 Persen	50,958,610	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen		
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	55,659,879	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	50,958,610	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 Persen	3,599,521,889	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 Persen	2,015,000,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen		

21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	2 dokumen	23,599,780	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	15,000,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen		
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	8 paket	2,649,327,089	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8 Unit	1,200,000,000	
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	4 dokumen	926,550,020	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	8 Pokmas	800,000,000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100 Persen	119,790,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100 Persen	27,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan(%)	100 Persen	119,790,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan(%)	100 Persen	27,000,000	
24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36 kali	119,790,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Riatang Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36 Laporan	27,000,000	

Pada table diatas diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Tanete Riattang barat pada RKPD Tahun 2022 dan analisis kebutuhan tahun 2023. pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan Pagu rancangan RKPD sebesar **Rp.21,394,210,518** sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi **Rp. 20.076.524.282** Pada prinsipnya acuan pagu Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan sasaran dan target capaian yang ditetapkan oleh BKAD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Tanete Riattang Barat didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

Tema RKP tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 arah kebijakan meliputi

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan ibu kota negara

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2023 agar diseleraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kebijakan-kebijakan nasional sebagaimana tersebut di atas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023

. Agenda dan program prioritas pembangunan nasional tersebut sudah selaras dengan salah satu misi Pemerintah Kab. Bone yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN**", dengan tujuan "**Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN**". Kecamatan Tanete Riattang Barat menjadi salah satu Perangkat Daerah yang berperan utama dalam mendorong pencapaian Misi dan Tujuan RPJMD tersebut.

Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat memiliki ruang lingkup tugas yakni Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Tanete Riattang Barat di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat tahun 2023 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat tahun 2023 adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Adapun tujuan dan sasaran beserta target capaian kinerja tersaji dalam table berikut ini

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1.	Tujuan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B	BB	A
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	90	92	100	100



### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Bone. Program dan kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bone dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Sebagaimana RKPD Tahun 2023 pagu indikatif anggaran Kecamatan Tanete Riattang Barat sebesar Rp. 23.604.447.502 yang bersumber dari 0,5% APBD Kabupaten Bone yang diperuntukan untuk 4 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagai berikut :

#### A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait
20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
21. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
22. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
23. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin (organic) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkat daerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kabupaten Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oleh Kemendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Tanete Riattang Barat melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Renja 2023 ini.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan focus perbaikan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan dibidang Pemerintahan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Tanete Riattang Barat sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Kerja 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program kegiatan merupakan komitmen dari Pimpinan, Kepala Seksi dan seluruh staff demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Watang Palakka, 25 Juli 2022  
CAMAT TANETE RIATTANG BARAT



**HASNAWATI RAMLI, S.Sos, M.Si**  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP : 196907 17 198908 2

**Lampiran :**

- 1. Cascading Tahun 2023**
- 2. Rumusan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

MISI  
KABUPATEN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

TUJUAN  
KECAMATAN

TUJUAN  
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

INDIKATOR  
Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

SASARAN  
KECAMATAN

SASARAN  
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

INDIKATOR  
Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan

CROSCUTTING

SELURUH PERANGKAT DAERAH, DAN INSTANSI PERTIKAL LAINYA (PENGADILAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KUA, KPP PRATAMA, TNI, POLRI, dll)

SASARAN  
PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN  
KEGIATAN  
DAN SUB  
KEGIATAN

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Penanggungjawab
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang Tersusun dan dilaporkan Sesuai kewajiban Perangkat Daerah	Sekcam
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daaerah	Sub Bagian Program dan Keuangan
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun	Sub Bagian Program dan Keuangan
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Bagian Program dan Keuangan
Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang tersusun	Sub Bagian Program dan Keuangan
Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Sub Bagian Program dan Keuangan
Terlaksananya pelaksanaan administrasi kepegawaian	Administarasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Sekcam
Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya pelaksanaan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Sekcam
Terselenggaranya penyediaan peralatan dan persiapan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhana	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terselenggaranya Penyediaan logistik kantor sesuai rencan kebutuhan	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu Sesuai Rencana Kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sesuai rencana Kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Sekcam
Terselenggaranya Penyediaan Tunjangan ASN penghasilan bagi ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bagi ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terselenggaranya Pelaksanaan Keungan SKPD verifikasi keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Bagian Keuangan
Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Sekcam
Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Seksi Pelayanan Umum, Kasubag Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terlaksananya Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Seksi Pelayanan Umum, Kasubag Umum dan Kepegawaian, lurah, seklur
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sekcam
Terselenggaranya Penyediaan dan Listrik wifi dan air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi dan Air	Sub Bagian Program dan Keuangan, lurah, seklur
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	Sub Bagian Program dan Keuangan, lurah, seklur
Terlaksananya Pengadaan barang milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Sekcam
Tersediaanya jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Seksi Pelayanan Umum, lurah, seklur
Terlaksananya pemeliharaan rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Seksi Pelayanan Umum, lurah, seklur

**SASARAN PELAKSANA/ STAF**

SASARAN PELAKSANA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah data penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah data penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran
Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bahan penyusunan dan koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja
Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terusun	Jumlah bahan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terusun

**SASARAN  
PELAKSANA/  
STAF**

Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dokumen pengadaan pakaian dinas beserta atribut
Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Terselenggaranya penyediaan peralatan dan persiapan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan dan penyediaan peralatan dan persiapan perlengkapan penunjang administrasi
Terselenggaranya Penyediaan logistik kantor sesuai rencana kebutuhan	Jumlah bahan kebutuhan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu
Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah data kebutuhan bahan cetak dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah data kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Terselenggaranya Penyediaan Tunjangan ASN penghasilan bagi ASN	Jumlah dokumen pembayaran Tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat
Terselenggaranya Pelaksanaan Keuangan SKPD verifikasi keuangan SKPD	Jumlah data verifikasi pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan
	Jumlah dokumentasi surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran
Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah data kebutuhan pengadaan mebel
Terlaksananya Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah data kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Terselenggaranya Penyediaan dan Listrik wifi dan air dan Listrik	Jumlah data kebutuhan listrik, wifi dan air
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah data kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Tersediaanya jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah data kebutuhan pemeliharaan dan pemabayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
Terlaksananya pemeliharaan rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah data pemeliharaan rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya



MISI  
KABUPATEN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

TUJUAN  
KECAMATAN

TUJUAN  
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan  
INDIKATOR  
Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

SASARAN  
KECAMATAN

SASARAN  
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik  
INDIKATOR  
Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan

CROSSCUTTING

SELURUH PERANGKAT DAERAH, DAN INSTANSI PERTIKAL LAINYA (PENGADILAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KUA, KPP PRATAMA, TNI, POLRI, dll)

SASARAN  
PROGRAM

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan

SASARAN  
KEGIATAN DAN  
SUB KEGIATAN

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Penanggungjawab
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kasubag Program dan Keuangan
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kasubag Program dan Keuangan

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Penanggungjawab
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TSKS	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lurah, Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Kesra
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lurah, Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Kesra Kelurahan, Kasi Pemerintahan
Terlaksananya Kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat, pelayanan perilaku hidup bersih dan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lurah, Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Kesra, Kasi

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Penanggungjawab
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Seksi Trantibum, Kasi Trantibum Kelurahan
Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika	Seksi Trantibum, Kasi Trantibum Kelurahan

SASARAN  
PELAKSANA  
/STAF

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah bahan koordinasi dan konsultasi serta pelaksanaan kegiatan dengan instansi vertikal
--	--

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah data kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah data kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Terlaksananya Kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan	Jumlah data kebutuhan Kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan

Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Jumlah Laporan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kelurahan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,400,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	2,958,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,726,800	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	2,589,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,807,991	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	22,598,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	22,598,410	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,526,286	
7	01	01	2.02																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	182 Orang/bulan	100 Persen	17,648,486,282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,367,177,886	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,164,000	
7	01	01	2.03																
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>7 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>8,400,000</b>				<b>10,164,000</b>	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,164,000
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>427,627,910</b>				<b>1,014,278,132</b>	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	108 Paket	100 Persen	56,533,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100,240,502
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	108 Paket	100 Persen	189,344,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	507,017,830
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	108 Paket	100 Persen	18,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	46,585,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	96 Dokumen	100 Persen	15,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	31,145,400
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	908 Laporan	100 Persen	148,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	329,289,400
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>51,645,600</b>				<b>66,040,371</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Unit	100 Persen	51,645,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	66,040,371
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>534,894,800</b>				<b>655,096,723</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	69,676,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	83,762,795
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	465,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	571,333,928

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>54,664,460</b>				<b>209,205,316</b>					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Unit	100 Persen	41,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	140,542,952
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Unit	100 Persen	13,539,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	68,662,364
7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>50,958,610</b>				<b>61,132,830</b>					
7	01	02	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>50,958,610</b>				<b>61,132,830</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	50,958,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	61,132,830
7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>15,000,000</b>				<b>25,959,757</b>					
7	01	03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>15,000,000</b>				<b>25,959,757</b>					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	25,959,757
7	01	04		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>27,000,000</b>				<b>131,769,000</b>					
7	01	04	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>27,000,000</b>				<b>131,769,000</b>					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan pengawasan internal kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan pengawasan internal kecamatan	100 Persen	131,769,000
<b>TOTAL</b>								<b>18,876,524,282</b>				<b>23,604,447,502</b>						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Macege

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
7																					
7	01																				
7	01	03																			
7	01	03	2.02																		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macege	100 Persen	1 Unit	100 Persen	59,396,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen				59,396,500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macege	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	90,603,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen				90,603,500
<b>TOTAL</b>													<b>150,000,000</b>								<b>150,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Macanang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>		
7	01	03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	71,351,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	71,351,800
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	78,648,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	78,648,200
<b>TOTAL</b>												<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Watang Palakka

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	03																
7	01	03	2.02															
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Watang Palakka	100 Persen	1 Unit	100 Persen	60,630,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	60,630,700
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Watang Palakka	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	89,369,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	89,369,300
<b>TOTAL</b>										<b>150,000,000</b>							<b>150,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Majang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>		
7	01	03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Majang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	54,485,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	54,485,100
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Majang	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	95,514,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	95,514,900
<b>TOTAL</b>												<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Mattirowalie

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	03																
7	01	03	2.02															
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Matirro Walie	100 Persen	1 Unit	100 Persen	98,890,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	98,890,900
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Matirro Walie	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	51,109,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	51,109,100
<b>TOTAL</b>										<b>150,000,000</b>							<b>150,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Jeppe'e

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>															
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														
7	01	03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Jeppee	100 Persen	1 Unit	100 Persen	62,444,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	62,444,400
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Jeppee	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	87,555,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	87,555,600
<b>TOTAL</b>												<b>150,000,000</b>			<b>150,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Bulu Tempe

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>															
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														
7	01	03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Unit	100 Persen	54,485,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	54,485,100
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	95,514,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	95,514,900
<b>TOTAL</b>												<b>150,000,000</b>			<b>150,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Polewali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>															
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														
7	01	03	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Polewali	100 Persen	1 Unit	100 Persen	81,434,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	81,434,500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Polewali	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	100 Persen	68,565,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	68,565,500
<b>TOTAL</b>												<b>150,000,000</b>			<b>150,000,000</b>		